

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 41 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2019

**RENCANA KERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

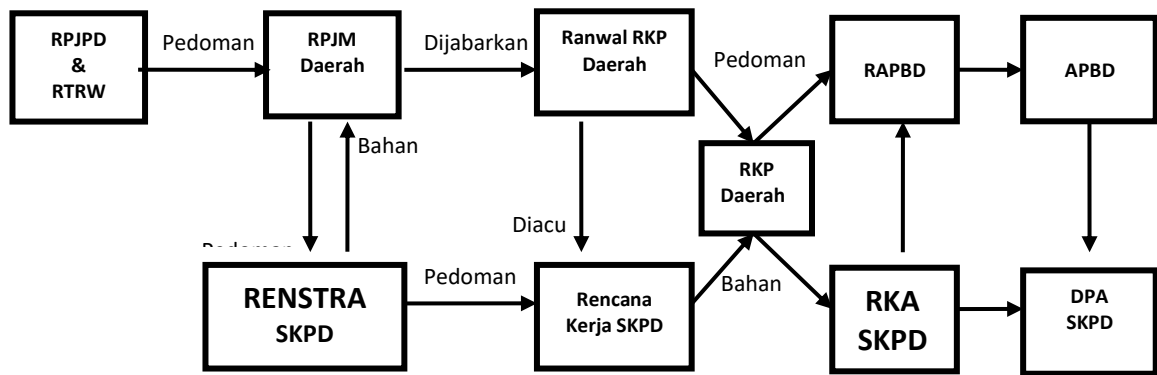
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019, telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati Malang: 188.45/329/KEP/ 35.07.013.2018 tanggal 7 Mei 2018 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
  25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/329/KEP/35.07.013.2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

##### Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2019
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### Bab III TUJUAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

##### Bab V PENUTUP.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 5.087.358.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.043.052.437,00- atau sebesar 99,13%.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
<b>2.07.2.07.01.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.07.2.07.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9,100 buah	1500 buah	2200 buah	2240 buah	101.82	2250 buah	4490 buah	49.34%*)
%2.07.2.07.01.01.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	2,108 OB	293 OB	363 OB	363 OB	100%	363 OB	726 OB	34.44%*)
2.07.2.07.01.01.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	11,601 Jenis	1900 Jenis	1931 Jenis	1931 Jenis	100% Jenis	1935 Jenis	3866 Jenis	33.32%*)
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	166,700 Jenis	32000 Jenis	32680 Jenis	32680 Jenis	100% Jenis	32690 Jenis	65370 Jenis	39.21%*)

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	286 Jenis	35 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100%	45 Jenis	85 Jenis	29.72%*)
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	9,420 Jenis	1500 Jenis	1584 Jenis	1584 Jenis	100%	1584 Jenis	3168 Jenis	33.63%*)
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	72,494 HOK	12050 HOK	12084 HOK	11153 HOK	92.30 %	12090 HOK	23243 HOK	32.06%*)
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	870 HOK	92 HOK	148 HOK	148 HOK	100%	150 HOK	298 HOK	34.25%*)
2.07.2.07.01.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2,396 HOK	128 HOK	418 HOK	477 HOK	114.11 %	425 HOK	902 HOK	37.65%*)
<b>2.07.2.07.01.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.07.2.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	10	-	-	-	-	4	4	40%*)
2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	112 Jenis	2 Jenis	14 Jenis	15 Jenis	107.14 %	10 Jenis	25 Jenis	22.32%*)
2.07.2.07.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	154 Unit	12 Unit	26 Unit	15 Unit	57.69 %	17 Unit	32 Unit	20.78%*)

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	340 jenis	14 jenis	61 jenis	27 jenis	44.26%	28 jenis	55 jenis	16.18%*)
2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	2 jenis	40%*)
<b>2.07.2.07.01.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.07.2.07.01.03.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	209 Stel	-	50 Stel	50 Stel	100%	50 Stel	100	47.85%*)
2.07.2.07.01.03.05	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	302 Stel	14 Stel	53 Stel	-	-	53 Stel	53 Stel	17.55%*)
<b>2.07.2.07.01.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.07.2.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	92 orang	15 orang	17 orang	25 orang	147.06 %	53 orang	78 orang	84.78%*)
<b>2.07.2.07.01.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	52 Buku	7 Buku	9 Buku	9 Buku	100%	9 Buku	18 Buku	34.62%*)

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	2 Buku	40%*)
<b>2.07.2.07.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase laporan keuangan desa.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.07.2.07.01.06.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	321 Desa	-	57 Desa	57 Desa	100%	-	57 Desa	17.76%*)
		Jumlah Pelatihan Penataan Pemerintahan Desa	378 Desa	18 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	378 Desa	386 Desa	100%
		Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	378 Desa	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	100%	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	100%
		Jumlah desa berprestasi tingkat Kabupaten	16 Desa	4 Desa	3 Desa	3 Desa	100%	3 Desa	6 Desa	37.50%
2.07.2.07.01.06.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	378 378 Desa	378 Desa	378 Desa	100%	378 Desa	378 Desa	100%
		Jumlah pembentukan Desk Keuangan Desa	5 kali	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	40%*)
2.07.2.07.01.06.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	100%	378 Desa	378 Desa	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
<b>2.07.2.07.01.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa</b>	<b>100%</b>	<b>16,66%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
2.07.2.07.01.07.01	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	104 Desa	26 Desa	-	-	-	26 Desa	26 Desa	25%*)
2.07.2.07.01.07.02	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah pembinaan lembaga adat desa	16 Desa	-	-	-	-	4 Desa	4 Desa	25%*)
2.07.2.07.01.07.03	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	100.00	33 Kec.	33 Kec.	100%
<b>2.07.2.07.01.08</b>	<b>Program Pengembangan Potensi Desa</b>	<b>Persentase peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>100%</b>	<b>16,66%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>43,75%</b>	<b>43,75%</b>	<b>43,75%</b>
2.07.2.07.01.08.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	50 Desa	-	8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa	16 Desa	32%*)
2.07.2.07.01.08.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	24 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	9 Desa	13 Desa	54.17%*)
2.07.2.07.01.08.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	33.33%*)
		Jumlah Desa pemanfaat / penerima bantuan peralatan TTG	48 Desa	8 Desa	12 Desa	10 Desa	83.33%	12 Desa	22 Desa	45.83%*)

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
<b>2.07.2.07.01.09</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>16,66%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>
2.07.2.07.01.09.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	75 Desa	5 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	12 Desa	22 Desa	29.33%*)
2.07.2.07.01.09.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	26 Desa	-	-	-	-	4 Desa	4 Desa	15%*)
2.07.2.07.01.09.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	4 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100%	-	1 Kali	25%*)
		Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat	4 Kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	25%*)
<b>2.07.2.07.01.19</b>	<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b>	<b>Persentase desa yang mengakomodir peran perempuan dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>10,34%</b>	<b>26,90%</b>	<b>48,28%</b>	<b>179%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>*)</b>
2.07.2.07.01.19.01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Desa Pelatihan Perempuan Usaha Ekonomi Produktif	145 Desa	15 Desa	24 Desa	55 Desa	179%	-	-	*)
<b>2.07.2.07.01.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>100%</b>	<b>16,66%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>*)</b>
2.07.2.07.01.01.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	*)

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah Desa pemanfaat / penerima bantuan peralatan TTG	48 Desa	8 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	-	-	*)
2.07.2.07.01.01.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Desa Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.	104 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	100%	-	-	*)
2.07.2.07.01.01.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	100%	-	-	*)
<b>2.07.2.07.01.01.17</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Persentase peningkatan swadaya masyarakat</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>7,57</b>	<b>151%</b>	-	-	*)
2.07.2.07.01.01.17.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	50 Desa	-	8 Desa	8 Desa	100%	-	-	*)
		Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	24 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	-	-	*)
2.07.2.07.01.01.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	100%	-	-	*)

Catatan penting :

\*) Capaian tahun 2016 tidak bisa terakumulasi karena memakai indikator lama pada dokumen perencanaan RKPD lama, tahun 2017 dan 2018 sudah terakumulasi.



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need approach*), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*), pengorganisasian dan pelebagaan masyarakat (*community institutional approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (*prosperity approach*), pendekatan lintas sektoral dan program (*cross sectoral program approach*), pendayagunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology approach*) serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (*rural and urban community approach*).

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang saat ini masih relative tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi cukup besar pula, kondisi ini diperberat dengan kondisi geografis kabupaten Malang mengharuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelembagaannya.

Dengan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana yang ada serta dukungan anggaran, maka dapat digambarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Eselon II :</b> Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju			10 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	10 Desa	-	4 Desa	4 Desa	
1	<b>Eselon III :</b> Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<b>Eselon IV :</b> Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			2200 buah	2250 buah	2300 buah	2350 buah	2240 buah	2250 buah	2300 buah	2350 buah	
	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			363 OB	363 OB	363 OB	363 OB	363 OB	363 OB	363 OB	363 OB	
	Jumlah petugas kebersihan (OB)			-	-	1 OB	-	-	-	1 OB	1 OB	
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			1,931 Jenis	1,935 Jenis	1,940 Jenis	1,945 Jenis	1,931	1,935 Jenis	1,940 Jenis	1,945 Jenis	
	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			32,680 Jenis	32,690 Jenis	32,700 Jenis	32,710 Jenis	32,680 Jenis	32,690 Jenis	32,700 Jenis	32,710 Jenis	
	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			40 Jenis	45 Jenis	50 Jenis	55 Jenis	40 Jenis	45 Jenis	50 Jenis	55 Jenis	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	
	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			12,084 HOK	12,090 HOK	12,090 HOK	12,090 HOK	12,084 HOK	12,090 HOK	12,090 HOK	12,090 HOK	
	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)			148 HOK	150 HOK	155 HOK	160 HOK	148 HOK	150 HOK	155 HOK	160 HOK	
	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			418 HOK	425 HOK	450 HOK	475 HOK	477 HOK	425 HOK	450 HOK	475 HOK	
<b>2</b>	<b>Eselon III : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Eselon IV : Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)</b>			-	4 Unit	2 Unit	2 Unit	-	4 Unit	2 Unit	2 Unit	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)			14 Jenis	15 Jenis	16 Jenis	17 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	16 Jenis	17 Jenis	
	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			26 Unit	27 Unit	28 Unit	29 Unit	15 Unit	27 Unit	28 Unit	29 Unit	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			61 Jenis	62 Jenis	63 Jenis	64 Jenis	27 Jenis	62 Jenis	63 Jenis	64 Jenis	
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)			1 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	
<b>3</b>	<b>Eselon III : Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Eselon IV : Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)</b>			-	50 Stel	53 Stel	53 Stel	-	50 Stel	53 Stel	53 Stel	
	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)			50 Stel	53 Stel	53 Stel	53 Stel	50 Stel	53 Stel	53 Stel	53 Stel	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG			10	12	12	12	10	12	12	12	
<b>10</b>	<b>Eselon III : Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.</b>			<b>20%</b>	<b>36%</b>	<b>54,67%</b>	<b>76%</b>	<b>20%</b>	<b>36%</b>	<b>54,67%</b>	<b>76%</b>	
	<b>Eselon IV : Jumlah BUMDesa yang dibentuk.</b>			10 Desa	12 Desa	14 Desa	16 Desa	10 Desa	12 Desa	14 Desa	16 Desa	
	Jumlah pelatihan usaha sektor informal			-	4 Desa	6 Desa	7 Desa	-	4 Desa	6 Desa	7 Desa	
	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu			-	1 kali	1 kali	1 kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	
	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat			-	1 kali	1 kali	1 kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	
<b>12</b>	<b>Eselon III : Persentase desa yang mengakomodir peran perempuan dalam pembangunan</b>			<b>26,90 %</b>	-	-	-	<b>48,28 %</b>	-	-	-	
	<b>Eselon IV : Jumlah Desa Pelatihan Perempuan Usaha Ekonomi Produktif</b>			24 Desa	-	-	-	69 Desa	-	-	-	

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

### **2.3.1 Peluang**

- Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemberdayaan masyarakat
- Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun daerah;
- Peraturan Bupati Malang tentang Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;
- Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM;
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **2.3.2 Tantangan**

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Masih tingginya jumlah RTM;
- Luas wilayah dan kondisi geografis.

## **2.4 Review Terhadap RKPD**

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah telah disusun pada akhir tahun sebelum awal tahun kegiatan berjalan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Rancangan Kerja Pemerintah Daerah tersebut perlu mendapatkan review. Adapun review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap RKPD Tahun 2019**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>924.141.962</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>635.545.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2300 buah	11.025.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2300 buah	7.582.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPMD	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	389.855.025	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPMD	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	268.109.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMD	Jumlah petugas kebersihan (OB)	2 ob	1.052.888	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMD	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 ob	724.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1940 Jenis	50.567.816	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1940 jenis	34.776.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32700 Jenis	18.852.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32700 jenis	12.965.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	50 Jenis	2.676.319	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	50 jenis	1.841.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 Jenis	5.953.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	4.094.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPMD	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12090 HOK	146.373.413	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPMD	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13000 HOK	100.663.000	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	155 HOK	124.113.938	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	155 HOK	85.355.000	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	450 HOK	173.671.313	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 HOK	119.436.000	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>185.738.933</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>127.736.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	34.386.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	16 jenis	47.135.183	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	16 jenis	32.416.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 Unit	39.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	17 unit	27.165.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	63 jenis	23.703.750	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	16.301.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPMD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 jenis	25.400.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPMD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	17.468.000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>34.128.150</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>23.470.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	53 Stel	11.130.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	7.654.000	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	53 Stel	22.998.150	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	53 Stel	15.816.000	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>13.104.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.012.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMD	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	17 orang	13.104.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMD	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	17 orang	9.012.000	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>125.747.844</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>DPMD</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>86.478.000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Buku	111.148.538	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	76.438.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	6.534.518	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	4.494.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	8.064.788	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	5.546.000	
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.</b>	<b>100%</b>	<b>2.460.831.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.</b>	<b>100%</b>	<b>1.642.348.000</b>	
	Penataan Pemerintahan Desa	307	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	307 Desa	1.137.354.000	Penataan Pemerintahan Desa	307 Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	214.914.	782.175.000	
		378	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	378 Desa	268.327.000		378 Desa	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	214.914.	184.532.000	
		390	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Ds/Kel	94.500.000		390 Ds/Kel	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	214.914.	64.989.000	
		3	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa	201.292.000		3 Desa	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	214.914.	138.431.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		50	Jumlah desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	50 Desa	222.308.000		50 Desa	Jumlah desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	50 Desa	261.753.000	
	Penatausahaan Keuangan Desa	378	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	453.318.000	Penatausahaan Keuangan Desa	378 Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	57.584.000	
	Penatausahaan Aset Desa	378	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	83.732.000	Penatausahaan Aset Desa	378 Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	83,732,000	
<b>7</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>	<b>66,67%</b>	<b>718.177.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>	<b>66,67%</b>	<b>507.737.000</b>	
	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	26 Desa	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 Desa	229.136.000	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	26 Desa	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	157.580.000	
	Pengembangan Lembaga Adat	4 Desa	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	4 Desa	77.175.000	Pengembangan Lembaga Adat	4 Desa	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	11 Kec.	116.911.000	
	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	33 Kec.	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	411.866.000	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	33 Kec.	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	233.246.000	
<b>8</b>	<b>Program Pengembangan Potensi Desa</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>62,50 %</b>	<b>826.874.000</b>	<b>Program Pengembangan Potensi Desa</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.</b>	<b>62,50 %</b>	<b>793.229.000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Kawasan Perdesaan	10 Desa	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	10 Desa	253.555.000	Pengembangan Kawasan Perdesaan	10 Desa	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	134.373.000	
	Pengembangan Sumber Daya Desa	6 Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	6 Desa	289.977.000	Pengembangan Sumber Daya Desa	6 Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	163.177.000	
								Desa TMMD	1 desa	225.000.000	
								Updating Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	119 desa	75.821.000	
	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 desa	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	68.428.000	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 desa	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	47.059.000	
		1 unit	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	214.914.000		1 unit	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	147.799.000	
<b>9</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	<b>54,67%</b>	<b>826.875.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	<b>54,67 %</b>	<b>744.901.000</b>	
	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	14 Desa	385.875.000	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	14 desa	310.875.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Usaha Sektor Informal	6 Desa	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	6 Desa	178.500.000	Pengembangan Usaha Sektor Informal	4 Desa	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	178.500.000	
								Jumlah sosialisasi program jalin matra	82 desa	75.000.000	
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	1	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 Desa	78,750,000	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	16 Desa	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	54.158.000	
		1	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat	33 Kec.	183,750,000		33 Kec.	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	126.368.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>6,115,617,889</b>					<b>4.570.456.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat merupakan usulan pembangunan dari Desa/Kelurahan yang oleh Kecamatan pada forum Musrebangcam dipilih dan ditetapkan sebagai program prioritas untuk diusulkan menjadi program perangkat daerah yang akan dibahas pada forum Musrenbang Kabupaten. Daftar usulan program dan kegiatan pembangunan dari Kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada aplikasi e-Musrenbang sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**

### **Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	4 Duku Desa Rejoyoso Kec. Bantur	Pemberian Bantuan Usaha Penduduk Miskin	20 Orang	APBD
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	11 Desa Se Kecamatan Dampit	Terbentuknya Bumdes Yang Berkualitas Melalui Pelatihan Tekhnis Sebanyak 6 Kali	10 Orang X 11 Desa X 6 Kegiatan	APBD
3	Program Pengembangan Potensi Desa.	Desa Jatikerto Kec. Kromengan	Pendampingan Pembuatan Alat Penumbuk Pande Besi 1 Unit	1 Unit	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Karang Taruna Dan Kader Pkk Kelurahan Kalirejo Kec. Lawang	5 Kegiatan / Pelatihan	5 Kegiatan / Pelatihan	APBD
5	Program Pengembangan Potensi Desa.	Desa Pagelaran, Suwaru, Kademangan, Balarjo, Clumprit, Banjarejo Kec. Pagelaran	Pembentukan Bumdes 6 Desa	6 Desa	APBD
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Desa Pagelaran, Banjarejo, Brongkal, Karangsuko, Kanigoro, Balarjo, Kademangan, Suwaru, Sidorejo, Clumprit Kec. Pagelaran	Jumlah Peserta 200 Orang	200 Orang	APBD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Lawang Kec. Lawang	Masing - Masing Ketua Rt Dan Rw Mendapatkan Insentif Tiap Bulan	74 X Rp.100.000 X 12 = 88.800.000	APBD
8	Program Pengembangan Potensi Desa.	Kecamatan Pagelaran	Peserta Lomba 10 Lembaga Pkk Desa	10 Lembaga Pkk Desa	APBD
9	Program Pengembangan Potensi Desa.	Kec. Sumberpucung	Peningkatan Usaha Usaha Promosi Dan Pemasaran Kegiatan Usaha Usaha Desa, Pariwisata, Profil Desa (Pembangunan Videotron) Sebanyak 1 Unit	Satu (1 ) Unit	APBD

Usulan Pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Malang adalah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Aparat Desa dalam pengelolaan Dana Desa	Desa se wilayah Kec. Gedangan	Pelatihan Bimbingan Teknis Aparat Desa dalam pengelolaan Dana Desa.	10 desa	APBD

Dari 9 usulan Kecamatan dan 1 usulan pokok-pokok pikiran DPRD, yang dapat diakomodir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

- a. 6 usulan Musrenbang Kecamatan;
- b. 1 Usulan pokok-pokok pikiran DPRD.

Adapun 6 usulan yang akan menjadi rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	4 Duku Desa Rejoyoso Kec. Bantur	Pemberian Bantuan Usaha Penduduk Miskin	20 Orang	APBD
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	11 Desa Se Kecamatan Dampit	Terbentuknya Bumdes Yang Berkualitas Melalui Pelatihan Tekhnis Sebanyak 6 Kali	10 Orang X 11 Desa X 6 Kegiatan	APBD
3	Program Pengembangan Potensi Desa.	Desa Jatikerto Kec. Kromengan	Pendampingan Pembuatan Alat Penumbuk Pande Besi 1 Unit	1 Unit	APBD
4	Program Pemberdayaan	Karang Taruna Dan	5 Kegiatan /	5 Kegiatan /	APBD



	Usaha Ekonomi Masyarakat.	Kader Pkk Kelurahan Kalirejo Kec. Lawang	Pelatihan	Pelatihan	
5	Program Pengembangan Potensi Desa.	Desa Pagelaran, Suwaru, Kademangan, Balarjo, Clumprit, Banjarejo Kec. Pagelaran	Pembentukan Bumdes 6 Desa	6 Desa	APBD
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.	Desa Pagelaran, Banjarejo, Brongkal, Karangsono, Kanigoro, Balarjo, Kademangan, Suwaru, Sidorejo, Clumprit Kec. Pagelaran	Jumlah Peserta 200 Orang	200 Orang	APBD

1 (satu) Usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan menjadi rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Aparat Desa dalam pengelolaan Dana Desa	Desa se wilayah Kec. Gedangan	Pelatihan Bimbingan Teknis Aparat Desa dalam pengelolaan Dana Desa.	10 desa	APBD

Sedangkan 3 usulan dilimpahkan ke dinas / perangkat daerah lain, karena 3 usulan tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Lawang Kec. Lawang	Masing - Masing Ketua Rt Dan Rw Mendapatkan Insentif Tiap Bulan	74 X Rp.100.000 X 12 = 88.800.000	APBD
2	Program Pengembangan Potensi Desa.	Kecamatan Pagelaran	Peserta Lomba 10 Lembaga Pkk Desa	10 Lembaga Pkk Desa	APBD
3	Program Pengembangan Potensi Desa.	Kec. Sumberpucung	Peningkatan Usaha Usaha Promosi Dan Pemasaran Kegiatan Usaha Usaha Desa, Pariwisata, Profil Desa (Pembangunan Videotron) Sebanyak 1 Unit.	Satu (1 ) Unit	APBD

### **BAB III**

#### **TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 pada Misi ke 5, melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel, maka tujuan, dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

#### **a. Tujuan**

Meningkatkan status desa menjadi desa maju.

#### **Indikator tujuan :**

Jumlah desa maju Kabupaten Malang.

#### **b. Sasaran**

Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.

#### **Indikator Sasaran :**

Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan, termasuk kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
8. Program Pengembangan Potensi Desa;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

#### 3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ;
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
12. Pengadaan peralatan gedung kantor;
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

16. Pengadaan pakaian kerja lapangan
17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ;
18. Pendidikan dan pelatihan formal;
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
20. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
23. Pembinaan Lembaga Adat;
24. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat;
25. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat
26. Pengembangan Usaha Sektor Informal
27. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran;
28. Pengembangan Sumber Daya Desa;
29. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
30. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
31. Penatausahaan Keuangan Desa;
32. Penataan Pemerintahan Desa;
33. Penatausahaan Aset Desa.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang untuk program rutin masih mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.07.2.07.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	DPMD	100%	635.545.000	APBD	-	100%	970.349.058	
2.07.2.07.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DPMD	2300 buah	7.582.000	APBD	-	2350 buah	11.576.250	
2.07.2.07.01.01.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	DPMD	363 ob	268.109.000	APBD	-	363 ob	409.347.776	
2.07.2.07.01.01.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	DPMD	1 ob	724.000	APBD		1 ob	1.105.532	
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	DPMD	1940 jenis	34.776.000	APBD	-	1945 jenis	53.096.207	
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	DPMD	32700 jenis	12.965.000	APBD	-	32710 jenis	19.795.388	
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	DPMD	50 jenis	1.841.000	APBD	-	55 jenis	2.810.135	
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DPMD	1584 jenis	4.094.000	APBD	-	1584 jenis	6.251.175	
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang	DPMD	13000 hok	100.663.000	APBD	-	13250 hok	153.692.083	

		disediakan (HOK)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DPMD	155 hok	85.355.000	APBD	-	160 hok	130.319.634	
2.07.2.07.01.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	DPMD	500 hok	119.436.000	APBD		550 hok	182.354.878	
<b>2.07.2.07.01.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>127.736.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>195.180.880</b>	
2.07.2.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	DPMD	2 unit	34.386.000	APBD		2 unit	55.000.000	
2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	DPMD	16 jenis	32.416.000	APBD		17 jenis	49.491.942	
2.07.2.07.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	DPMD	17 unit	27.165.000	APBD		18 unit	40.000.000	
2.07.2.07.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	30 jenis	16.301.000	APBD		30 jenis	24.888.938	
2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	1 jenis	17.468.000	APBD		1 jenis	25.800.000	
<b>2.07.2.07.01.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>23.470.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>35.834.558</b>	
2.07.2.07.01.03.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	DPMD	53 Stel	7.654.000	APBD		53 Stel	11.686.500	
2.07.2.07.01.03.05	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	DPMD	53 stel	15.816.000	APBD		53 stel	24.148.058	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.07.2.07.01.5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>9.012.000</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>15.724.000</b>	
2.07.2.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	DPMD	17	9.012.000	APBD		25	15.724.000	
<b>2.07.2.07.01.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>86.478.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>132.035.234</b>	
2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	DPMD	12 Buku	76.438.000	APBD		12 Buku	116.705.964	
2.07.2.07.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	DPMD	1 buku	4.494.000	APBD		1 buku	6.861.243	
2.07.2.07.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	DPMD	1 buku	5.546.000	APBD		1 buku	8.468.027	
<b>2.07.2.07.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100</b>	<b>1.642.348.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.389.650.000</b>	
2.07.2.07.01.06.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	307 Desa	307 Desa	782.175.000	APBD		0 Desa	-	
		Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	1 kali	1 kali	184.532.000	APBD		1 kali	281.743.000	
		Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	390 Desa/Kel.	64.989.000	APBD		390 Desa/Kel.	99.225.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa	3 Desa	138.431.000	APBD		3 Desa	211.357.000	
		Jumlah desa Pelatihan aparaturn Pemerintahan Desa	378 Desa	378 Desa	152.884.000	APBD		378 Desa	233.424.000	Mengakomodir kegiatan PUG.
2.07.2.07.01.06.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	378 Desa	261.753.000	APBD		378 Desa	475.983.000	
2.07.2.07.01.06.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	378 Desa	57.584.000	APBD		378 Desa	87.918.000	
<b>2.07.2.07.01.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>66,67%</b>	<b>507.737.000</b>	<b>APBD</b>		<b>83,33%</b>	<b>848.052.000</b>	
2.07.2.07.01.07.01	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	26 desa	157.580.000	APBD		26 desa	240.593.000	Mengakomodir kegiatan PUG.
2.07.2.07.01.07.02	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	11 Kec.	11 Kec.	116.911.000	APBD		11 Kec.	175.000.000	
2.07.2.07.01.07.03	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	33 Kec.	233.246.000	APBD		33 Kec.	432.459.000	
<b>2.07.2.07.01.08</b>	<b>Program Pengembangan Potensi Desa</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>62,50%</b>	<b>793.229.000</b>	<b>APBD</b>		<b>81,25 %</b>	<b>983.978.500</b>	
2.07.2.07.01.08.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	8 desa	134.373.000	APBD		8 desa	266.232.000	
2.07.2.07.01.08.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	4 desa	163.177.000	APBD		4 desa	304.476.000	Mengakomodir kegiatan PUG.
		Desa TMMD	1 desa	1 desa	225.000.000			-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Updating Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	119 desa	119 desa	75.821.000	APBD		127 desa	115.762.500	
2.07.2.07.01.08.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	12 desa	47.059.000	APBD		12 desa	71.849.000	
		Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	1 unit	147.799.000	APBD		1 unit	225.659.000	
<b>2.07.2.07.01.09</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>54,67 %</b>	<b>744.901.000</b>	<b>APBD</b>		<b>76,00 %</b>	<b>868.217.750</b>	
2.07.2.07.01.09.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	14 desa	14 desa	310.875.000	APBD		16 desa	405.168.750	
2.07.2.07.01.09.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	4 desa	178.500.000	APBD		4 desa	187.425.000	Mengakomodir kegiatan PUG.
		Jumlah sosialisasi program jalin matra	82 desa	82 desa	75.000.000	APBD		4 desa	187.425.000	
2.07.2.07.01.09.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	16 desa	54.158.000	APBD		16 desa	82.687.000	
		Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	33 Kec.	126.368.000	APBD		33 Kec.	192.937.000	
<b>Jumlah</b>					<b>4.570.456.000</b>				<b>5.439.021.980</b>	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, top down, buttom up maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat top down, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari Instansi Vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat buttom up, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang dimasukkan pada aplikasi e Musrenbang. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang.

Pendanaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.2.07.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	DPMD	100%	635.545.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DPMD	2300 buah	7.582.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	DPMD	363 ob	268.109.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		DPMD	1 ob	724.000	APBD	
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	DPMD	1940 jenis	34.776.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	DPMD	32700 jenis	12.965.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	DPMD	50 jenis	1.841.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DPMD	1584 jenis	4.094.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	DPMD	13000 hok	100.663.000	APBD	-
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DPMD	155 hok	85.355.000	APBD	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.2.07.01.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	DPMD	500 hok	119.436.000	APBD	
<b>2.07.2.07.01.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>127.736.000</b>	<b>APBD</b>	
2.07.2.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	DPMD	2 unit	34.386.000	APBD	
2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	DPMD	16 jenis	32.416.000	APBD	
2.07.2.07.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	DPMD	17 unit	27.165.000	APBD	
2.07.2.07.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	30 jenis	16.301.000	APBD	
2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	1 jenis	17.468.000	APBD	
<b>2.07.2.07.01.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>23.470.000</b>	<b>APBD</b>	
2.07.2.07.01.03.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	DPMD	53 Stel	7.654.000	APBD	
2.07.2.07.01.03.05	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	DPMD	53 stel	15.816.000	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.07.2.07.01.6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>86.478.000</b>	<b>APBD</b>	
2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	DPMD	12 Buku	76.438.000	APBD	
2.07.2.07.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	DPMD	1 buku	4.494.000	APBD	
2.07.2.07.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	DPMD	1 buku	5.546.000	APBD	
<b>2.07.2.07.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100%</b>	<b>1.642.348.000</b>	<b>APBD</b>	
2.07.2.07.01.06.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	307 Desa	307 Desa	782.175.000	APBD	
		Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	1 kali	1 kali	184.532.000	APBD	
		Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	390 Desa/Kel.	64.989.000	APBD	
		Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa	3 Desa	138.431.000	APBD	
		Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	378 Desa	152.884.000	APBD	
2.07.2.07.01.06.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	378 Desa	261.753.000	APBD	
2.07.2.07.01.06.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	378 Desa	57.584.000	APBD	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.07.2.07.01.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>66,67%</b>	<b>507.737.000</b>	<b>APBD</b>	
2.07.2.07.01.07.01	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	26 desa	157.580.000	APBD	
2.07.2.07.01.07.02	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	11 Kec.	11 Kec.	116.911.000	APBD	
2.07.2.07.01.07.03	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	33 Kec.	233.246.000	APBD	
<b>2.07.2.07.01.08</b>	<b>Program Pengembangan Potensi Desa</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>62,50%</b>	<b>793.229.000</b>	<b>APBD</b>	
2.07.2.07.01.08.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	8 desa	134.373.000	APBD	
2.07.2.07.01.08.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	4 desa	163.177.000	APBD	
		Desa TMMD	1 desa	1 desa	225.000.000	APBD	
		Updating Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	119 desa	119 desa	75.821.000	APBD	
2.07.2.07.01.08.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa pemanfaat/ penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	12 desa	47.059.000	APBD	
		Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	1 unit	147.799.000	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.2.07.01.09	<b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>54,67 %</b>	<b>744.901.000</b>	<b>APBD</b>	
2.07.2.07.01.09.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	14 desa	14 desa	310.875.000	APBD	
2.07.2.07.01.09.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	4 desa	178.500.000	APBD	
		Jumlah sosialisasi program jalin matra	82 desa	82 desa	75.000.000	APBD	
2.07.2.07.01.09.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	16 desa	54.158.000	APBD	
		Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	33 Kec.	126.368.000	APBD	
<b>Jumlah</b>					<b>4.570.456.000</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2019 terdapat 9 program dan 33 kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan.

Rencana tindaklanjut jika dalam proses pelaksanaan program dan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka akan dilaksanakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan mekanisme mengusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

**LAMPIRAN :****1. Penjelasan Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program beserta Rumusan Formula**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
<b>Tujuan 5 :</b> Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel.		
<b>Sasaran 5.1:</b> Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang	Jumlah desa maju Kabupaten Malang	Jumlah desa maju Kabupaten Malang tahun (n)
Program 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	$\left[ \frac{\sum \text{Desa yang menyampaikan laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu}}{\sum \text{Desa yang seharusnya menyampaikan laporan}} \times 100\% \right]$
Program 2 : Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	$\left[ \frac{\sum \text{BUMDes yang dibina}}{\sum \text{Desa}} \times 100\% \right]$
Program 3 : Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	$\left[ \frac{\sum \text{Desa yang memanfaatkan potensi desa (Teknologi Tepat Guna dan SDD)}}{\sum \text{Desa yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$
Program 4 : Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	$\left[ \frac{\sum \text{LPMD/K yang dibina}}{\sum \text{LPMD/K yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (sesuai E-Renstra Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)

Indikator Kinerja Utama	Formula	t0	t1	t2	t3	t4	t5
1	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	0	10	4	4	4	4

## CASCADING/POHON KINERJA DPMD KAB. MALANG TAHUN 2019

Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa.

Meningkatnya Desa Maju Kabupaten Malang

RPJMD

Jumlah Desa Maju Kabupaten Malang  
Target : 129 desa

Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.

RENSTRA

Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju  
Target : 4 desa

Program Peningkatan  
Kapabilitas Aparatur  
Pemerintahan Desa

PROGRAM

1. Penataan Pemerintahan Desa
2. Penataan Keuangan Desa
3. Penataan Aset Desa

Rp. 1.642.348.000

Program Pemberdayaan Usaha  
Ekonomi Masyarakat

1. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat
2. Pengembangan Usaha Sektor Informal
3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan RTS.

Rp. 744.901.000

Program Pemberdayaan  
Lembaga  
Kemasyarakatan

1. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Pengembangan Lembaga Adat
3. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Rp. 507.737.000

Program Pengembangan  
Potensi Desa

KIBLATAN

1. Pengembangan Kawasan Perdesaan
2. Pengembangan Sumber Daya Desa
3. Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Rp. 793.229.000

ANGGARAN